

TRANSFORMASI EKONOMI DESA MELALUI KOPERASI MERAH PUTIH: KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT DI YOUTUBE

Suyitno^{1*}

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, Indonesia, yitnomasdar@umla.ac.id

*Corresponding Author

Rokhimah²

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Da'wah, Institut Agama Islam Negeri Sorong, Sorong, Indonesia, rokhimah@iainsorong.ac.id

Erna Nur Faizah³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, Indonesia, faizahnurerna@gmail.com

Abstract

Background – The Koperasi Merah Putih Program aims to strengthen the people's economy in villages by empowering the community through cooperatives that can create jobs, improve welfare, and reduce dependence on large markets. However, the major challenge faced is the often lack of transparency in the management of cooperatives, as well as the potential misuse of funds that can undermine the program's objectives. This research aims to explore the public's perception of the Koperasi Merah Putih as an instrument of economic empowerment at the village level, as well as assess the challenges faced by cooperatives in achieving their goals.

Aim – This study aims to: (1) analyze public perceptions of the role of the Koperasi Merah Putih in strengthening the people's economy, (2) identify challenges in cooperative management, including transparency issues and potential corruption, (3) explore the role of cooperatives in the empowerment of women and marginalized groups, and (4) provide recommendations to improve the effectiveness of cooperatives in the economic empowerment of rural communities.

Design / methodology / approach – This study uses a qualitative approach with content analysis. The data was obtained from comments on the YouTube platform related to the Koperasi Merah Putih. The comments were selected based on their relevance to the themes of economic empowerment, cooperative management challenges, and transparency. Thematic analysis techniques are used to identify key themes from the collected data.

Findings – The findings show that despite many positive expectations for cooperatives, the public is concerned about the potential misuse of funds and non-transparent management. Cooperatives are also expected to be a means of empowering women and marginalized groups, but there are still challenges related to the inadequate capacity of cooperative administrators.

Conclusion – The Koperasi Merah Putih has great potential in strengthening the people's economy, but it requires transparent management and training for administrators to ensure its success. Efficient and accountable management will encourage active participation from the community, increase member trust, and ensure that the cooperative's goals can be achieved in a sustainable manner.

Research implication – This study suggests the need for a more stringent monitoring system and ongoing training for cooperative managers to increase the effectiveness of these programs. Independent supervision and structured training will ensure transparent, accountable, and supportive management of the cooperative in facing operational challenges and improving managerial skills consistently and professionally.

Limitations – The study was limited to secondary data from YouTube comments, which may not be representative of the views of the entire rural community. Further research with primary data collection methods is needed to dig into a more comprehensive perspective.

Diterima : 15 Juni 2025

Direview : 24 September 2025

Direvisi : 3 Oktober 2025

Disetujui : 6 Oktober 2025



Keywords : *Koperasi Merah Putih, People's Economy, Community Empowerment, Transparency, and Social Participation*

Abstrak

Latar Belakang - Program Koperasi Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dengan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketergantungan pada pasar besar. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah pengelolaan koperasi yang sering kali kurang transparan, serta potensi penyalahgunaan dana yang dapat merusak tujuan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, serta menilai tantangan yang dihadapi koperasi dalam mencapai tujuannya.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis persepsi masyarakat terhadap peran Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, (2) mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan koperasi, termasuk masalah transparansi dan potensi korupsi, (3) mengeksplorasi peran koperasi dalam pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, dan (4) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Desain / metodologi / pendekatan - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten, analisis tematik dan analisis triangulasi. Data diperoleh dari komentar-komentar di platform YouTube yang terkait dengan Koperasi Merah Putih. Komentar-komentar tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema pemberdayaan ekonomi, tantangan pengelolaan koperasi, dan transparansi. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang terkumpul.

Temuan - Temuan menunjukkan bahwa meskipun banyak harapan positif terhadap koperasi, masyarakat khawatir dengan potensi penyalahgunaan dana dan pengelolaan yang tidak transparan. Koperasi juga diharapkan menjadi sarana pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, namun masih terdapat tantangan terkait dengan kapasitas pengurus koperasi yang belum memadai.

Kesimpulan - Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, namun memerlukan pengelolaan yang transparan dan pelatihan bagi pengurus untuk memastikan keberhasilannya. Pengelolaan yang efisien dan akuntabel akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memastikan bahwa tujuan koperasi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Implikasi penelitian - Penelitian ini menyarankan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan pelatihan berkelanjutan untuk pengurus koperasi guna meningkatkan efektivitas program ini. Pengawasan yang independen dan pelatihan yang terstruktur akan memastikan pengelolaan koperasi yang transparan, akuntabel, serta mendukung pengurus dalam menghadapi tantangan operasional dan meningkatkan keterampilan manajerial secara konsisten dan profesional.

Batasan penelitian - Penelitian ini terbatas pada data sekunder dari komentar YouTube, yang mungkin tidak mewakili pandangan seluruh masyarakat desa. Penelitian lebih lanjut dengan metode pengumpulan data primer diperlukan untuk menggali perspektif yang lebih komprehensif.

Kata kunci : Koperasi Merah Putih, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Masyarakat, Transparansi, dan Partisipasi Sosial.

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan koperasi di desa, khususnya melalui Program Pengembangan Koperasi

Merah Putih, sangat penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harini et al., 2023). Koperasi Merah Putih diharapkan dapat mendorong perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja,



serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Inpres Nomor 9 Tahun 2025, 2025). Pada era global yang ditandai dengan disrupsi pada semua aspek kehidupan masyarakat, koperasi bukan hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga sebagai ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara sosial dan ekonomi (Mamdouh dan Chentoufi, 2023). Keberadaan koperasi yang dikelola secara kolektif dalam masyarakat desa, selain berfungsi sebagai wadah perekonomian, juga harus mampu menjawab tantangan sosial dan politik yang sering kali muncul, termasuk dalam aspek pengelolaan dan transparansi (Chatra et al., 2025).

Dalam berbagai program diskusi publik di platform YouTube, muncul beragam perspektif mengenai bagaimana koperasi bisa dijadikan instrumen yang efektif dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Diskusi tersebut mengangkat beragam isu terkait dengan bagaimana koperasi dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam perekonomian desa yang cenderung bergantung pada pasar global dan kurang berdaya dalam menghadapi fluktuasi harga yang sering terjadi (Budiman dan Suhendi, 2024). Namun, kritik juga datang terkait dengan potensi penyalahgunaan dana dan korupsi yang dapat merusak kredibilitas koperasi, yang sering kali melibatkan pengurus desa yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan pemimpin

local (Hidajat, 2025). Semakin menegaskan betapa pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam pengembangan koperasi di tingkat desa, agar koperasi benar-benar dapat berfungsi sebagai solusi bagi masyarakat desa dan bukan sebaliknya menjadi ajang kepentingan pribadi segelintir oknum (Siagian *et al.*, 2025).

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Penelitian oleh Widjaja, (2024) mengungkapkan bahwa koperasi merupakan alat penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan cara mengorganisir anggota untuk bersama-sama mengelola sumber daya, berbagi risiko, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang seringkali merugikan petani dan produsen kecil. Selain itu, penelitian (Zhong *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa koperasi di sektor pertanian memberikan peluang untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, sehingga memungkinkan para petani kecil untuk memperoleh harga yang lebih baik atas produk mereka, serta mengurangi ketergantungan pada perantara atau pihak ketiga.

Sementara itu, dalam konteks pariwisata, studi oleh Kartika dan Syafrudin, (2023) menunjukkan bahwa koperasi yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di desa dapat menciptakan peluang

pendapatan baru bagi masyarakat desa. Mereka juga dapat memperbaiki infrastruktur desa dan memperkuat jaringan sosial dalam komunitas tersebut. Lebih lanjut, studi oleh Al Mubaroq *et al.*, (2025) mengungkapkan bahwa koperasi di desa dapat menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dari masyarakat, yang sangat penting untuk keberlanjutan dan kemajuan ekonomi desa.

Meskipun berbagai studi menunjukkan tentang potensi besar koperasi dalam pemberdayaan ekonomi desa, terdapat juga banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian oleh Kathayat, (2024) mencatat bahwa salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola koperasi, terutama jika pengurus koperasi berasal dari kalangan elit desa yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi lebih besar. Keberadaan dugaan praktik korupsi dalam koperasi desa menjadi isu yang sering kali muncul dalam diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana koperasi (Dumitru *et al.*, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan peran koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, namun terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dijawab dalam studi mengenai koperasi Merah Putih di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekonomi koperasi secara mikro, seperti analisis tentang

peningkatan pendapatan anggota koperasi atau pemberdayaan petani (Ma *et al.*, 2023). Namun, penelitian yang membahas secara mendalam tentang peran koperasi dalam menciptakan ruang publik yang memberdayakan masyarakat desa, khususnya dalam konteks pembentukan koperasi Merah Putih yang difokuskan pada ekonomi kerakyatan, masih sangat terbatas. Studi-studi sebelumnya belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek sosial, politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus koperasi sebagai faktor kunci dalam kesuksesan koperasi tersebut.

Terdapat pula beragam penelitian mengenai pemberdayaan perempuan melalui koperasi, namun studi yang mengaitkan pemberdayaan perempuan dengan pengelolaan koperasi Merah Putih di Indonesia belum banyak dilakukan. Studi (Nawaz *et al.*, 2023; Nisha *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok swadaya masyarakat (*Self-Help Groups/SHG*) dapat menjadi platform yang sangat efektif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, namun implementasi konsep serupa dalam konteks koperasi Merah Putih belum banyak diteliti secara mendalam. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran koperasi Merah Putih dalam memberdayakan perempuan dan kelompok marginal lainnya, serta bagaimana koperasi dapat menjadi ruang publik yang

inklusif dalam rangka mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana koperasi Merah Putih dapat berfungsi sebagai ruang publik yang memberdayakan masyarakat desa melalui ekonomi kerakyatan. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengeksplorasi peran koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat desa, (2) menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi, termasuk potensi praktik korupsi dan ketidaktransparanan dalam pengelolaannya, (3) mengidentifikasi peran koperasi dalam pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, serta (4) mengevaluasi sejauh mana koperasi Merah Putih dapat berfungsi sebagai ruang publik yang inklusif bagi seluruh anggota komunitas desa.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan penelitian terdahulu, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Koperasi Merah Putih diragukan kemampuannya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan, potensi korupsi, serta peranannya dalam memberdayakan perempuan dan kelompok marginal. Keraguan tersebut akan diuji dengan menggunakan *content analysis* agar

penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada para stakeholder Koperasi Merah Putih. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah Bagaimana Koperasi Merah Putih dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di desa, mengatasi tantangan pengelolaan, transparansi, dan potensi korupsi, serta berfungsi sebagai ruang publik inklusif yang memberdayakan perempuan dan kelompok marginal untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang efektif?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah konsep yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal (Wahib dan Susanto, 2024). Prinsip utama ekonomi kerakyatan adalah pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial, di mana koperasi menjadi instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks desa, ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan hasil penelitian Dufays *et al.*, (2020) bahwa keberadaan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, dianggap sangat relevan dalam memperkuat ekonomi desa karena koperasi

mengedepankan gotong royong dan demokrasi ekonomi sebagai prinsip dasar yang memungkinkan anggota untuk bersama-sama mengelola sumber daya, berbagi risiko, dan mencapai manfaat ekonomi yang lebih adil. Berdasarkan Almeida-García *et al.*, (2016) ruang publik dalam ekonomi kerakyatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial tetapi juga sebagai platform untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Koperasi sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara kolektif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan layanan dan fasilitas ekonomi yang lebih baik. Sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, koperasi memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada pasar global yang sering kali merugikan petani atau produsen kecil (Ajates, 2020). Dalam konteks Indonesia, koperasi telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti koperasi pertanian, koperasi konsumsi, dan koperasi pekerja. Sejarah koperasi di Indonesia mencatat bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, baik melalui pembagian hasil yang adil maupun melalui pengurangan biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh

anggota (Shpykuliak dan Sakovska, 2020). Studi sebelumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Novkovic, (2022), menunjukkan bahwa koperasi dapat meningkatkan produktivitas dengan mengorganisasi anggota untuk bersama-sama mengelola sumber daya, berbagi risiko, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.

Koperasi Merah Putih: Potensi dan Tantangan

Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dengan memberdayakan masyarakat melalui koperasi yang dikelola secara transparan dan partisipatif. Tujuan utama Koperasi Merah Putih adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada pasar besar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Masyhuri, 2024). Dalam pelaksanaannya, koperasi ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi lokal, terutama dalam hal stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan pemberdayaan petani serta pedagang kecil yang terlibat dalam koperasi. Namun, tantangan besar yang dihadapi koperasi Merah Putih adalah masalah transparansi dalam pengelolaan dana dan potensi penyalahgunaan oleh pengurus yang memiliki hubungan politik atau kekerabatan dengan perangkat desa (Kamila *et al.*, 2023). Kekhawatiran terhadap pengelolaan yang

tidak transparan ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan koperasi dalam memperkuat ekonomi desa. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan koperasi Merah Putih, pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan pengawasan yang independen sangat diperlukan.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi

Pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi, terutama Koperasi Merah Putih, sangat penting dalam mendorong partisipasi ekonomi yang inklusif. Koperasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya bersama, mengurangi ketergantungan pada pasar besar, serta meningkatkan kualitas hidup melalui distribusi hasil yang lebih adil (Vijaya, 2025). Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan dasar dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa koperasi berperan penting dalam memperkuat daya tawar petani kecil dan masyarakat desa terhadap pasar yang sering kali dikuasai oleh tengkulak atau perantara (Maflahah *et al.*, 2024). Pada sektor pariwisata, koperasi juga berpotensi menciptakan peluang pendapatan baru bagi masyarakat desa dan memperbaiki infrastruktur lokal (Arumsari *et al.*, 2023). Melalui koperasi, masyarakat

desa dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, memperkuat jaringan sosial, dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, koperasi Merah Putih diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa, baik dalam sektor pertanian, pariwisata, maupun sektor lainnya.

Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Marginal

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan koperasi. Oleh sebab itu, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi ruang inklusif yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan di desa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi (Suyitno, 2018). Melalui koperasi, perempuan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, keterampilan kewirausahaan, dan literasi keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan posisi sosial dan ekonomi mereka dalam keluarga dan masyarakat (Basnet, 2023). Selaras dengan hasil studi Kumari *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kelompok swadaya masyarakat (*Self-Help Groups/SHG*) sangat efektif dalam pemberdayaan perempuan di pedesaan, dan koperasi Merah Putih dapat mengadopsi prinsip-prinsip serupa untuk memberdayakan perempuan di tingkat desa. Pemberdayaan perempuan melalui koperasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan secara individu,

tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Sutikno et al., 2023). Oleh karena itu, koperasi Merah Putih memiliki potensi untuk menjadi alat pemberdayaan yang efektif bagi perempuan dan kelompok marginal di desa dalam menumbuhkan partisipasi substansial terhadap pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

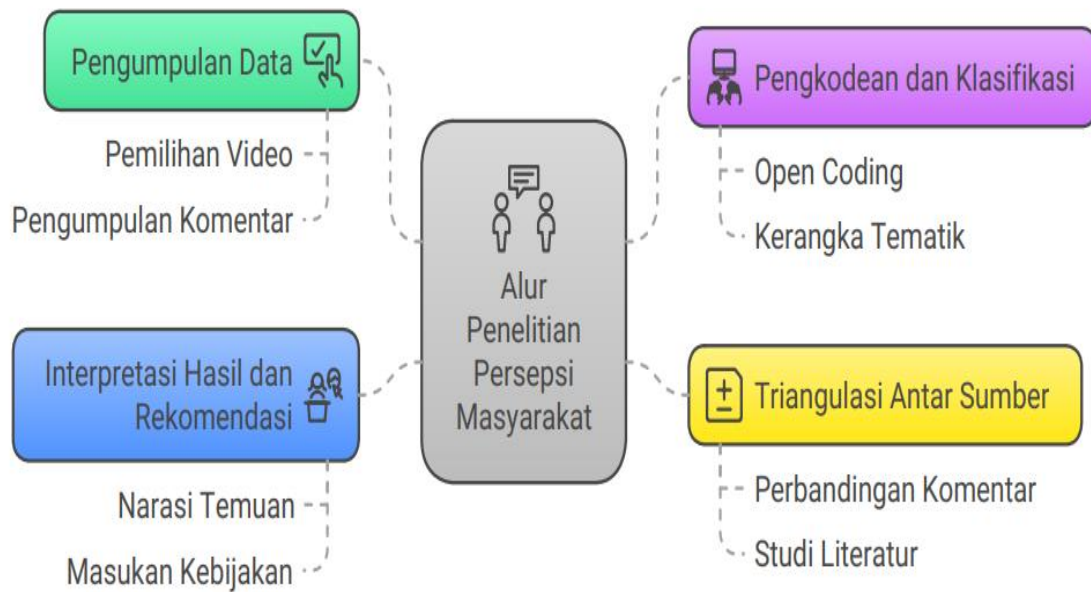
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi

Isu transparansi dalam pengelolaan koperasi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih. Meskipun koperasi memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat merusak kredibilitas koperasi dan menghambat pencapaian tujuan ekonomi kerakyatan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus koperasi sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan distribusi hasil (Hasbi et al., 2024). Oleh karena itu, koperasi Merah Putih perlu memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan semua anggota koperasi dalam proses pengambilan keputusan dan

pemantauan pengelolaan keuangan. Penelitian terkait pengelolaan koperasi yang transparan juga menunjukkan bahwa koperasi yang mengadopsi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari anggota, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi kerakyatan (Rubiyanty et al., 2025).

Alur penelitian

Alur penelitian dalam kajian ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan terkait persepsi masyarakat terhadap program Koperasi Merah Putih sebagai instrumen transformasi ekonomi desa. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten, khususnya analisis tematik terhadap komentar-komentar publik yang tersedia di platform YouTube. Pemilihan YouTube sebagai sumber data tidak dilakukan secara acak, melainkan dipertimbangkan sebagai ruang publik digital yang merepresentasikan diskursus masyarakat kontemporer, terutama dalam konteks keterlibatan publik dalam isu-isu pembangunan ekonomi lokal, sebagai tampak pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Koperasi Merah Putih

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari komentar-komentar di platform YouTube terkait Koperasi Merah Putih, yang dipilih atas dasar terbukanya peluang bagi peneliti untuk mengakses pandangan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali perspektif dan opini yang berkembang dalam diskusi publik tentang pengembangan koperasi Merah Putih (Abdussamad, 2021). Dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai video yang memuat diskusi tentang koperasi Merah Putih, penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan potensi koperasi dalam memberdayakan ekonomi

kerakyatan. Data yang dikumpulkan tidak terfokus pada lokasi fisik tertentu karena komentar yang tersebar mencerminkan pandangan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyaring komentar yang relevan dengan topik penelitian, termasuk mengenai transparansi pengelolaan dan dampak koperasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memberikan peluang untuk menangkap spektrum opini publik yang luas, termasuk harapan, kritik, serta respons emosional yang muncul secara alami dalam ruang diskursus digital. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola pikir kolektif masyarakat terhadap program koperasi

berbasis desa yang digagas pemerintah. Ragam komentar juga mencerminkan dinamika sosial-politik di tingkat akar rumput, termasuk kepercayaan terhadap aparat desa dan persepsi terhadap intervensi negara. Sumber berita, Judul berita, link dan jumlah komentar sebagaimana disajikan pada tabel 1.

Setelah komentar-komentar terkumpul dalam jumlah yang memadai, peneliti melakukan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam diskusi tersebut (Graneheim et al., 2017). Proses analisis dimulai dengan *open coding*, di mana komentar-komentar relevan ditandai dan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori awal. Selanjutnya, menggunakan *axial coding*, kategori-kategori ini dikelompokkan lebih lanjut menjadi tema-tema utama, dengan fokus pada transparansi, pemberdayaan, dan tantangan pengelolaan koperasi. Analisis ini tidak hanya melihat frekuensi kemunculan isu, tetapi juga konteks dan makna di balik setiap komentar.

Setelah itu, tahapan *selective coding* dilakukan untuk mengidentifikasi narasi sentral yang mencerminkan fokus utama penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mencari pola-pola yang lebih spesifik dan integratif dari tema-tema yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang menjadi inti dari pandangan masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih. Hasil dari seluruh analisis ini digunakan untuk menyusun pola narasi

yang holistik, menggambarkan persepsi publik terhadap koperasi secara tematik dan komprehensif. Analisis konten membuka ruang bagi peneliti untuk mengklasifikasikan komentar-komentar berdasarkan topik yang relevan dengan tujuan penelitian, mencakup manfaat koperasi Merah Putih, tantangan dalam pengelolaannya, dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap koperasi Merah Putih (Sitasari, 2022). Proses analisis tematik dimulai dengan pengkodean data, yaitu menandai bagian-bagian komentar yang berkaitan dengan topik utama, lalu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori berdasarkan tema yang muncul. Hasil analisis tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat memandang koperasi Merah Putih dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu perbandingan antara berbagai komentar yang berasal dari berbagai video YouTube yang berbeda. Triangulasi ini bertujuan untuk memverifikasi konsistensi temuan yang diperoleh dan memastikan bahwa hasil penelitian tidak terdistorsi oleh bias dari

satu sumber komentar atau video tertentu (Palupi, 2024). Selain itu, peneliti juga melakukan analisis ulang terhadap komentar-komentar yang serupa untuk mengidentifikasi kesamaan pandangan yang disampaikan oleh para komentator.

Triangulasi ini mampu meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian, memastikan bahwa pandangan yang terkumpul mencerminkan perspektif asli dari masyarakat yang terlibat dalam diskusi tentang koperasi Merah Putih.

Tabel 1
Sumber Penggalan Data di YouTube

No.	Sumber Berita	Judul Berita	Link /URL	Jumlah Komentar
1	CNN	Koperasi Merah Putih Harus Terbentuk dan Berjalan	https://youtu.be/pXq89sUYGRk?si=wc_fLDs-6lx3XLX1	49
2	Tribun news	Koperasi Desa Merah Putih Ladang Ekonomi atau Korupsi? Ekonom: Jangan Sampai Ulang Orde Baru	https://youtu.be/L1ltcdb_vTA?si=woO6SBeTC6h15f-X	58
3	Kom-pas TV	Ada Risiko di Balik Koperasi Desa Merah Putih? Begini Temuan Celios	https://youtu.be/o8NYJwXou6s?si=9LGqHRGUUhGzifY7	115
4	Kom-pas TV	Berapa Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih?	https://youtu.be/EK8VItl_bln?si=pkKVcSzDyCe3KD0x	147
Jumlah Total				369

Sumber: Data Primer diolah (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Konten

Analisis konten dalam penelitian ini dilakukan terhadap 369 komentar publik dari empat video YouTube yang membahas secara khusus Koperasi Merah Putih (KMP). Proses analisis dimulai dengan pendekatan *open coding* untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang muncul dalam komentar-komentar tersebut. Selanjutnya, *axial coding* digunakan untuk mengelompokkan komentar ke dalam tema-tema utama yang saling berhubungan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti transparansi,

pemberdayaan, dan tantangan pengelolaan koperasi. Tahapan terakhir, yaitu *selective coding*, dilakukan untuk menemukan narasi sentral yang mencerminkan tema-tema dominan dari komentar publik, yang menjadi fokus utama penelitian. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya melihat frekuensi kemunculan isu, tetapi juga menggali konteks dan makna yang lebih dalam, sehingga menghasilkan pola narasi yang holistik dan terstruktur mengenai pandangan masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih.

1. Harapan Terhadap Peran Koperasi Merah Putih

Tema pertama yang muncul secara dominan dalam komentar publik adalah harapan bahwa KMP dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Banyak komentar mencerminkan optimisme terhadap kemampuan koperasi dalam menciptakan stabilitas harga, memangkas ketergantungan pada tengkulak, serta membuka akses barang kebutuhan dasar secara lebih terjangkau. Komentar seperti “koperasi bisa menyeimbangkan pasar” atau “membantu petani mendapat harga adil” menunjukkan kepercayaan masyarakat pada koperasi sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis komunitas.

Dalam pandangan publik, koperasi tidak hanya dilihat sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan sosial yang mampu memberdayakan kelompok rentan di pedesaan. Ekspektasi ini selaras dengan semangat ekonomi kerakyatan, di mana koperasi dipandang sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap pasar besar. Keberadaan koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mendorong semangat gotong royong dan kolaborasi dalam pembangunan ekonomi lokal.

2. Kekhawatiran Terhadap Potensi Korupsi

Meskipun terdapat harapan, tema kedua yang muncul kuat adalah kekhawatiran terhadap potensi korupsi dalam tubuh koperasi. Banyak komentar menyoroti bahwa jika koperasi dikelola oleh orang-orang dekat kepala desa atau tim sukses politik, maka risiko penyalahgunaan dana sangat besar. Frasa seperti “koperasi jadi ladang korupsi” atau “awas disalahgunakan oleh oknum desa” menjadi pola yang berulang dalam analisis konten. Kekhawatiran ini mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola desa yang selama ini dinilai tidak transparan. Komentar-komentar tersebut juga mengingatkan pada kegagalan program serupa seperti BUMDes akibat lemahnya akuntabilitas. Publik menginginkan agar pengurus koperasi berasal dari unsur masyarakat independen yang bebas dari konflik kepentingan. Tema ini menegaskan pentingnya integritas kelembagaan dan desain pengawasan yang kuat jika KMP ingin berjalan secara berkelanjutan.

3. Kelemahan dalam Pengelolaan dan Pengawasan

Tema ketiga berkaitan dengan tantangan pengelolaan koperasi, terutama kapasitas SDM pengurus yang dinilai belum memadai. Banyak komentar mengkritik

kurangnya keahlian dalam manajemen koperasi, mulai dari pembukuan, pengadaan barang, hingga pengambilan keputusan strategis. Narasi seperti “pengurus tidak paham usaha” atau “butuh pelatihan dulu sebelum jalan” menunjukkan kegelisahan masyarakat terhadap kualitas pelaksana koperasi. Di sisi lain, pengawasan juga dianggap lemah, terutama jika dilakukan secara internal tanpa mekanisme kontrol dari luar.

Beberapa komentar mengusulkan perlunya pelibatan lembaga eksternal seperti auditor independen atau lembaga pendamping koperasi. Ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya ingin koperasi terbentuk, tetapi juga berjalan secara profesional dan efisien. Lemahnya pengelolaan dapat menjadi titik rawan kegagalan koperasi jika tidak diantisipasi dengan pelatihan dan sistem kontrol yang memadai.

4. Minimnya Edukasi dan Sosialisasi

Banyak komentar dalam analisis konten juga menyoroti minimnya sosialisasi dan edukasi koperasi kepada masyarakat desa. Frasa seperti “tidak tahu cara kerja koperasi” dan “bingung harus ikut atau tidak” menandakan adanya kesenjangan informasi antara pelaksana program dan masyarakat sebagai calon anggota. Masyarakat desa dinilai belum mendapatkan pemahaman yang cukup

mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi, sistem pengelolaan, serta potensi manfaat jangka panjangnya. Tanpa edukasi yang kuat, partisipasi masyarakat akan rendah dan kepercayaan terhadap koperasi tidak akan tumbuh secara organik.

Beberapa komentar menyarankan agar dilakukan pelatihan publik, penyuluhan terbuka, serta pemanfaatan media lokal untuk menyampaikan informasi koperasi secara sederhana dan mudah dipahami. Edukasi yang baik dinilai sebagai prasyarat penting untuk menumbuhkan budaya koperasi yang sehat dan berdaya.

5. Keterbatasan Pasar Lokal

Tema berikutnya adalah keraguan terhadap keberlanjutan koperasi karena keterbatasan pasar lokal. Sebagian komentar mempertanyakan apakah koperasi bisa bertahan dengan hanya melayani kebutuhan masyarakat desa yang skalanya kecil. Ada pula yang menyebut bahwa “volume transaksi terlalu rendah” dan “pasar desa tidak cukup kuat untuk menopang operasional koperasi.” Kekhawatiran ini muncul karena koperasi dituntut tidak hanya melayani sosial, tetapi juga harus sehat secara bisnis. Dalam pandangan publik, perlu ada strategi diversifikasi usaha atau pengembangan jaringan pemasaran keluar desa agar koperasi tetap hidup. Hal ini menunjukkan bahwa

keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada niat baik dan dukungan pemerintah, tetapi juga pada strategi bisnis yang adaptif terhadap realitas pasar.

Hasil Analisis Tematik

Analisis tematik dalam penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi lebih lanjut hasil identifikasi konten dari 369 komentar publik mengenai Koperasi Merah Putih (KMP) yang diperoleh dari platform YouTube. Proses ini bertujuan menggali makna, intensitas, dan narasi yang muncul secara berulang dan signifikan dalam komentar publik. Setiap tema mencerminkan aspek penting dalam dinamika koperasi sebagai ruang publik yang sedang dipertaruhkan dalam kebijakan dan praktik di tingkat akar rumput.

1. Harapan Kolektif dan Legitimasi Sosial Terhadap Koperasi

Tema pertama dalam analisis tematik adalah munculnya harapan kolektif dari masyarakat terhadap koperasi sebagai simbol kemandirian ekonomi desa. Banyak komentar mengandung legitimasi moral terhadap program KMP sebagai kebijakan yang dinilai tepat dalam mengatasi dominasi pasar besar dan tengkulak. Harapan ini tidak semata-mata teknokratis, melainkan bersifat ideologis—koperasi dianggap sebagai jalan alternatif menuju keadilan sosial. Frasa seperti "akhirnya rakyat bisa punya

wadah sendiri" atau "koperasi ini harapan kami" menggambarkan bentuk dukungan yang kuat dari masyarakat desa.

Pola komentar semacam ini menunjukkan adanya dukungan publik yang belum tentu bersifat rasional-instrumental, tetapi berbasis pada keinginan untuk mendapatkan kembali kendali atas sumber ekonomi lokal. Analisis ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki legitimasi sosial yang tinggi, yang bila dikelola dengan benar, akan memperkuat partisipasi anggota dan memperluas dampaknya dalam jangka panjang.

2. Ketidakpercayaan Struktural dan Potensi Korupsi

Tema kedua yang menonjol adalah munculnya narasi ketidakpercayaan publik terhadap aparat desa atau tokoh lokal yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Dalam analisis tematik, ketidakpercayaan ini bukan hanya bersifat individual tetapi struktural—masyarakat merasa bahwa sistem yang ada membuka peluang terjadinya penyimpangan. Banyak komentar menyebutkan kekhawatiran terhadap "tim sukses", "keluarga kepala desa", atau "perangkat yang doyan proyek", yang menunjukkan adanya relasi kuasa yang mencurigakan. Komentar publik mencerminkan bahwa koperasi tidak

akan efektif jika dikelola oleh elite lokal yang tidak akuntabel.

Tema ini menunjukkan adanya defisit kepercayaan horizontal dan vertikal dalam tata kelola desa, serta kebutuhan mendesak akan desain pengawasan yang independen. Oleh karena itu, integritas pengelola menjadi determinan utama keberhasilan koperasi, dan reformasi tata kelola menjadi isu sentral yang berulang dalam diskursus publik.

3. Lemahnya Desain Kelembagaan dan Kepemimpinan Koperasi

Tema ketiga mengarah pada lemahnya desain kelembagaan koperasi dan rendahnya kapasitas kepemimpinan pengurus. Analisis tematik menemukan bahwa banyak pengurus koperasi belum memiliki pemahaman memadai terkait prinsip koperasi, manajemen keuangan, maupun keterampilan wirausaha. Ketimpangan ini menciptakan persepsi bahwa koperasi hanya akan menjadi beban administratif dan gagal mencapai efisiensi ekonomi. Beberapa komentar secara eksplisit menyebutkan perlunya pelatihan, pendampingan, dan struktur organisasi yang fungsional. Isu ini penting karena dalam teori institusional, kelembagaan yang lemah cenderung menciptakan ruang abu-abu untuk penyimpangan dan kegagalan program. Ketiadaan sistem insentif yang sehat serta kurangnya deliniasi peran antara

pengurus dan pengawas turut memperparah kondisi. Analisis ini menekankan bahwa koperasi bukan hanya membutuhkan sumber daya finansial, tetapi juga desain kelembagaan yang kokoh dan adaptif terhadap konteks lokal.

4. Eksklusi Informasi dan Kesenjangan Literasi Ekonomi

Tema keempat yang kuat dalam analisis tematik adalah eksklusi informasi, yakni ketidakmerataan pengetahuan masyarakat tentang apa itu koperasi dan bagaimana koperasi seharusnya beroperasi. Banyak komentar menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami hak, kewajiban, atau struktur koperasi, bahkan tidak tahu bagaimana cara bergabung. Hal ini menciptakan jarak antara perancang program dan sasaran program. Pola ini mencerminkan kegagalan sosialisasi, dan menunjukkan rendahnya literasi ekonomi yang seharusnya menjadi prasyarat pelaksanaan koperasi yang sehat.

Dalam konteks demokrasi ekonomi, partisipasi membutuhkan informasi dan edukasi yang memadai. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi simbol administratif tanpa substansi. Oleh karena itu, peran edukatif koperasi dan pemerintah desa menjadi penting untuk mencegah terjadinya alienasi warga dari

program yang secara ideologis justru dirancang untuk mereka.

5. Ketimpangan Ekonomi dan Daya Tahan Pasar Lokal

Analisis juga menemukan tema kelima yaitu keterbatasan ekonomi struktural yang dihadapi oleh desa, terutama terkait daya beli, volume pasar, dan rantai pasok. Beberapa komentar menyangsikan apakah koperasi bisa bertahan hanya dengan mengandalkan pasar lokal yang kecil dan tidak likuid. Komentar seperti “pasarnya kecil, apa bisa untung?” menandakan realisme publik terhadap hambatan struktural ekonomi desa. Dalam konteks ini, koperasi harus dirancang tidak hanya sebagai entitas lokal tertutup, tetapi juga memiliki koneksi pasar yang lebih luas, baik melalui jejaring antardesa, digitalisasi distribusi, maupun konsolidasi permintaan.

Tema ini menunjukkan bahwa koperasi memerlukan strategi skala ekonomi dan inovasi model bisnis yang adaptif agar bisa menjadi entitas yang kompetitif, bukan hanya normatif. Dengan demikian, desain ekonomi koperasi harus bersifat terbuka, responsif, dan berbasis potensi riil wilayah.

Hasil Analisis Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan

reliabilitas hasil temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, format komentar, dan latar belakang kanal YouTube yang dianalisis. Dengan mengintegrasikan komentar dari empat kanal berbeda meliputi media CNN Indonesia, Kompas TV, dan Tribun New, Triangulasi juga dilakukan secara horizontal (antar kanal) dan vertikal (antara komentar publik dan narasi resmi dalam video), menghasilkan pemahaman yang lebih holistik terhadap persepsi publik atas program Koperasi Merah Putih.

1. Konsistensi Tema Antarkanal

Hasil triangulasi menunjukkan adanya konsistensi kuat dalam tema yang muncul di setiap kanal YouTube. Baik di CNN Indonesia yang menampilkan sudut pandang kebijakan pemerintah, maupun di Kompas TV dan Tribun News yang menyajikan dimensi investigatif dan kritik, ditemukan pengulangan narasi publik yang serupa. Tema seperti kekhawatiran terhadap potensi korupsi, harapan akan kemandirian ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap pengurus yang berasal dari elite desa muncul secara konsisten di seluruh sumber. Ini memperkuat kredibilitas temuan bahwa persepsi masyarakat terhadap koperasi tidak bersifat sporadis, melainkan sistematis dan terbentuk oleh pengalaman sosial yang homogen di banyak wilayah. Meskipun gaya bahasa dan tingkat literasi komentar berbeda-

beda, arah narasinya menunjukkan pola kesadaran kolektif yang seragam.

2. Perbedaan Kedalaman dan Nuansa Komentar

Meskipun tema besar konsisten, triangulasi juga menemukan variasi dalam kedalaman dan nuansa komentar tergantung pada kanal dan gaya penyajian video. Komentar pada video CNN Indonesia cenderung lebih normatif dan bersifat dukungan terhadap kebijakan, sedangkan pada Kompas TV yang bernuansa investigatif, muncul komentar yang lebih kritis dan tajam, terutama soal transparansi dan risiko moral hazard. Di sisi lain, pada video Tribun News, terdapat lebih banyak komentar yang bernuansa spekulatif dan berbasis pengalaman lokal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persepsi publik tidak hanya dipengaruhi oleh substansi program, tetapi juga oleh cara narasi dibingkai oleh media. Analisis ini memperkuat pentingnya membandingkan berbagai sumber untuk memahami dinamika wacana publik secara menyeluruh.

3. Validasi Temuan melalui Repetisi Pola

Triangulasi juga berfungsi sebagai alat validasi terhadap temuan analisis tematik sebelumnya. Pola komentar yang berulang pada isu transparansi, lemahnya kapasitas pengurus, serta

minimnya sosialisasi koperasi, muncul dalam berbagai bentuk ekspresi di tiap kanal. Repetisi tema ini menandakan bahwa temuan sebelumnya bukan hasil bias seleksi data, melainkan refleksi nyata dari persepsi publik yang tersebar. Misalnya, kata kunci seperti “korupsi”, “transparan”, “tim sukses”, dan “butuh pelatihan” ditemukan berulang lebih dari 50 kali dalam komentar dari kanal yang berbeda. Ini memperkuat keyakinan bahwa masalah-masalah tersebut merupakan inti kegelisahan masyarakat yang harus ditangani dalam desain implementasi koperasi.

4. Konfirmasi dan Penajaman Interpretasi Teoritis

Melalui triangulasi, peneliti juga dapat mengonfirmasi keterkaitan antara data lapangan dengan kerangka teoritis seperti ekonomi kerakyatan, ruang publik, dan *good governance* koperasi. Tema pemberdayaan perempuan, misalnya, meskipun tidak selalu muncul secara eksplisit, dapat dilacak melalui komentar yang menyinggung perlunya akses yang adil dan inklusif bagi seluruh warga desa, termasuk ibu rumah tangga dan kelompok marginal. Dengan membandingkan berbagai sumber komentar, peneliti memperoleh fondasi yang lebih kuat untuk menyimpulkan bahwa koperasi tidak hanya dipandang sebagai sarana distribusi barang, tetapi

juga sebagai simbol aspirasi demokrasi ekonomi. Hasil triangulasi ini mendukung teori bahwa koperasi berfungsi sebagai institusi sosial yang mempertemukan kepentingan ekonomi dan keadilan struktural di tingkat lokal.

5. Penguatan Implikasi Kebijakan dan Strategi Lapangan

Analisis triangulasi juga menghasilkan implikasi yang lebih tajam untuk perumusan kebijakan. Dengan melihat kesamaan keluhan dan harapan di berbagai wilayah—sebagaimana tercermin dalam komentar lintas kanal—dapat disimpulkan bahwa pendekatan

terstandarisasi dalam pelatihan, pengawasan, dan sistem insentif koperasi sangat diperlukan. Selain itu, publik juga memberikan sinyal perlunya keterlibatan lembaga eksternal seperti universitas, lembaga audit independen, atau KPK untuk menjaga integritas koperasi. Keberulangan ide-ide ini dalam komentar dari kanal berbeda menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut bukan aspirasi elit, melainkan desakan akar rumput yang muncul secara organik. Oleh karena itu, hasil triangulasi bukan hanya mengonfirmasi data tematik, tetapi juga memperkaya daya guna temuan dalam konteks kebijakan publik.



Gambar 2. Triangulasi Komentar Kanal Youtube Tentang Koperasi Merah Putih

Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji secara mendalam berbagai perspektif terkait dengan program Koperasi Merah Putih (KMP), yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat desa. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari diskusi publik di platform YouTube, berbagai perspektif dari masyarakat desa terkait program ini sangat beragam. Beberapa di antaranya menyoroti potensi besar koperasi sebagai agen perubahan ekonomi, sementara yang lainnya mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap masalah pengelolaan dan potensi penyalahgunaan dana yang dapat merusak tujuan program. Berdasarkan komentar yang terkumpul, uraian ini akan membahas berbagai tantangan, peluang, dan dampak dari program Koperasi Merah Putih dalam konteks ekonomi kerakyatan, serta bagaimana koperasi dapat berfungsi sebagai ruang publik yang memberdayakan masyarakat.

Pemahaman Ruang Publik dalam Ekonomi Kerakyatan dan Peran Koperasi Merah Putih

Konsep ruang publik dalam ekonomi kerakyatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, tetapi juga sebagai platform vital untuk

keterlibatan komunitas dalam aktivitas ekonomi. Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan salah satu bentuk penerapan konsep ini di Indonesia, di mana koperasi diharapkan menjadi wadah yang mampu mengoptimalkan distribusi barang dan jasa, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada pasar global atau pasar besar yang sering memonopoli harga (Tadesse et al., 2019). Banyak pula komentar dari masyarakat yang menggarisbawahi pentingnya koperasi sebagai agen ekonomi yang lebih terjangkau, yang memberi kesempatan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih kompetitif tanpa terjebak dalam permainan harga oleh pihak-pihak tertentu (Brzustowski dan Caselli, 2025).

Selaras dengan hasil penelitian (Su et al., 2024) bahwa ruang publik dalam konteks ekonomi kerakyatan berfungsi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ekonomi, sehingga mereka bisa lebih memahami dan berperan aktif dalam mengelola ekonomi mereka sendiri. Koperasi, dengan prinsip gotong-royong dan demokrasi ekonomi, merupakan mekanisme yang ideal untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan hasil ekonomi secara kolektif. Dalam hal ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan kolaborasi antar anggota, yang pada akhirnya memperkuat

solidaritas dan kesadaran ekonomi masyarakat desa (Boadu et al., 2024).

Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Merah Putih

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam diskusi mengenai Koperasi Merah Putih adalah bagaimana koperasi ini dapat menjadi alat pemberdayaan, terutama bagi perempuan di pedesaan. Dalam berbagai komentar yang ditemukan, terlihat bahwa perempuan yang terlibat dalam koperasi Merah Putih tidak hanya memperoleh akses ke barang-barang kebutuhan dasar dengan harga yang lebih murah, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut sangat strategis, sebagaimana ditunjukkan oleh Sapkota, (2024), perempuan di pedesaan sering kali terbatas dalam hal akses pendidikan ekonomi, dan koperasi dapat menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Sebagai contoh, salah satu komentar mencatat, "Koperasi dapat membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi dan memperoleh kemandirian finansial".

Lebih lanjut, Nawaz et al., (2023) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas perempuan melalui program ekonomi yang berbasis di ruang publik, seperti koperasi, berperan penting dalam mengurangi ketimpangan gender dan meningkatkan

pemberdayaan finansial perempuan. Program ini tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk mengakses pasar yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan mereka, ada akhirnya dapat memperkuat posisi mereka dalam perekonomian rumah tangga maupun komunitas. Dengan model pemberdayaan tersebut, koperasi Merah Putih dapat menjadi media untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan secara efektif dalam meningkatkan kapasitas sosial dan pertumbuhan ekonomi kaum perempuan di tingkat desa.

Tantangan dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih

Meskipun banyak harapan positif, namun masih terdapat komentar yang mencerminkan kekhawatiran terhadap pengelolaan koperasi Merah Putih. Salah satu isu utama yang diangkat adalah mengenai potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana yang dapat merusak integritas koperasi. Sebagian besar komentator mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman dengan program-program serupa sebelumnya, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), menunjukkan bahwa pengelolaan yang buruk dan penyalahgunaan dana merupakan masalah serius yang dapat menggagalkan tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Setiawan, 2022). Sebagaimana diungkapkan salah seorang

komentator, "Koperasi ini bisa jadi sarang korupsi, terutama dengan pengurus yang berasal dari kalangan kepala desa dan tim suksesnya".

Simetris dengan hasil penelitian Rubiyanty *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa dalam pengelolaan koperasi, keberhasilan sangat bergantung pada transparansi dan integritas pengurus. Dalam konteks koperasi Merah Putih, jika pengurus koperasi berasal dari kalangan kepala desa atau perangkat desa, maka risiko penyalahgunaan dana bisa meningkat, terutama jika tidak ada sistem pengawasan yang independen. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan agar koperasi Merah Putih dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa tanpa terbebani oleh praktik korupsi.

Peran Pengawasan dan Transparansi dalam Keberhasilan Koperasi

Tantangan pengawasan menjadi sangat penting dalam konteks koperasi Merah Putih, di mana pengurus koperasi dan perangkat desa sering kali memiliki hubungan erat, yang dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan secara objektif. Beberapa komentar menyarankan agar koperasi ini diawasi oleh lembaga independen seperti KPK atau Kejaksaan Agung, untuk memastikan bahwa dana koperasi tidak

disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya menjaga transparansi dalam pengelolaan dana koperasi, agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan dan dibagikan kepada anggota koperasi (Dasuki, 2024).

Pada konteks tersebut, Dumitru *et al.*, (2021) menyarankan bahwa dalam sistem koperasi, transparansi pengelolaan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan anggota terhadap pengurus. Pengelolaan koperasi yang transparan, di mana setiap anggota dapat memantau aliran dana dan pembagian keuntungan, akan meningkatkan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, keberhasilan koperasi Merah Putih sangat bergantung pada bagaimana pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan akuntabel, serta bagaimana pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang independen.

Pentingnya Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM Pengurus Koperasi

Selain pengawasan, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih adalah rendahnya kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi yang lebih besar dan kompleks. Banyak komentar yang mengungkapkan bahwa pengurus koperasi sering kali tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola koperasi, yang membuat mereka rentan terhadap kesalahan

dalam pengelolaan keuangan dan operasi koperasi secara keseluruhan. Sebagai diungkapkan seorang komentator yang berperan sebagai pengurus koperasi merah putih, "Kami membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam agar bisa mengelola koperasi dengan baik, karena kami tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengelola usaha besar".

Sinambung dengan hasil penelitian Asri dan Tandiayu, (2024), pelatihan yang intensif untuk pengurus koperasi sangat penting untuk meningkatkan keterampilan pengurus dalam manajemen keuangan, pengelolaan bisnis, serta pengambilan keputusan yang bijak. Tanpa pelatihan yang memadai, pengurus koperasi tidak akan mampu mengelola koperasi dengan efisien, yang dapat berujung pada kegagalan program. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan koperasi dalam jangka panjang.

Sosialisasi kepada Masyarakat Desa

Selain penguatan kapasitas pengurus, sosialisasi yang jelas mengenai koperasi Merah Putih kepada masyarakat desa juga menjadi aspek yang sangat penting. Terdapat beberapa komentar yang menunjukkan bahwa masyarakat desa seringkali tidak memahami sepenuhnya bagaimana koperasi ini berfungsi dan apa

manfaat yang dapat mereka peroleh. Sebagaimana diungkapkan salah satu komentator, "Jika pengurus koperasi tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada anggota koperasi tentang bagaimana koperasi ini berjalan, maka anggota tidak akan memahami peran mereka dalam koperasi".

Sejalan dengan pendapat tersebut, Cabrerros *et al.*, (2025) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan koperasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ekonomi. Sosialisasi yang intensif akan membantu anggota koperasi untuk memahami dengan jelas bagaimana koperasi bekerja, bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif, dan bagaimana keuntungan dibagikan secara adil. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar dari anggota terhadap keberhasilan koperasi.

Potensi Dampak Ekonomi Kerakyatan Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Sebagaimana yang disarankan oleh Hannachi *et al.*, (2020) koperasi memiliki kemampuan untuk mengorganisir sumber daya ekonomi di tingkat lokal, sehingga dapat meningkatkan daya tawar masyarakat dalam menghadapi ketidakstabilan pasar global. Dengan sistem koperasi yang adil, keuntungan yang

diperoleh dapat dikembalikan kepada masyarakat desa dalam bentuk peningkatan layanan sosial dan infrastruktur desa.

Secara faktual, Koperasi juga dapat berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mengakses barang-barang kebutuhan dasar seperti pupuk, gas, dan produk lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah komentar menunjukkan bahwa masyarakat desa mengharapkan koperasi ini bisa menekan harga barang kebutuhan pokok, yang selama ini dikendalikan oleh pihak-pihak yang memonopoli pasar. Koperasi yang sukses dalam mengelola barang-barang kebutuhan dasar dapat menciptakan pasar yang lebih stabil dan adil bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program Koperasi Merah Putih (KMP) memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan ekonomi lokal yang lebih adil. Dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi, koperasi ini menawarkan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar besar yang tidak selalu berpihak pada masyarakat kecil. Mayoritas komentar dalam diskusi publik di platform YouTube mendukung koperasi

sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi desa, terutama dalam sektor-sektor yang sebelumnya dikuasai pasar luar. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan masalah transparansi dan pengelolaan dana yang rentan terhadap potensi penyalahgunaan oleh pengurus yang memiliki keterkaitan politik. Isu ketidaktransparanan ini menjadi hambatan dalam mencapai tujuan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengelolaan koperasi Merah Putih juga menghadapi tantangan dalam hal penguatan kapasitas pengurus, di mana banyak pengurus yang tidak memiliki pengalaman atau pelatihan yang memadai dalam manajemen koperasi. Keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada pelatihan yang efektif bagi pengurus agar mampu mengelola koperasi dengan baik. Namun terdapat pula nilai positif, bahwa koperasi memiliki potensi untuk memberdayakan perempuan dan kelompok marginal di desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan literasi ekonomi dan kewirausahaan mereka. Dengan pemberdayaan yang tepat, perempuan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan komunitas serta memperkuat posisi sosial mereka. Oleh karena itu, koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai ruang publik

yang memperkuat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi Merah Putih memiliki potensi signifikan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa, namun memerlukan perbaikan dalam aspek pengelolaan dan transparansi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pengelola koperasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan berkelanjutan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana koperasi akan memperbaiki kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal melalui koperasi sebagai ruang inklusif yang dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di desa.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam memaksimalkan potensi koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terutama kepada pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih yang telah berpartisipasi dalam diskusi publik, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi untuk menyampaikan ide dan gagasan tentang koperasi merah putih di YouTube. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, rekan, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan teknis selama proses penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (I)*. CV. Syakir Media Press.
- Ajates, R. (2020). Agricultural cooperatives remaining competitive in a globalised food system: At what cost to members, the cooperative movement and food sustainability? *Organization*, 27(2), 337–355. <https://doi.org/10.1177/1350508419888900>



- Almeida-García, F., Peláez-Fernández, M. Á., Balbuena-Vázquez, A., & Cortés-Macias, R. (2016). Residents' perceptions of tourism development in Benalmádena (Spain). *Tourism Management*, 54(3), 259–274. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.11.007>
- Asri, M., & Tandiyu, B. (2024). Enhancing Accounting Proficiency through Community Engagement: Training for Gugah Mandiri Cooperative in Jeneponto, South Sulawesi. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(8), 777–783. <https://doi.org/10.59837/c584z962>
- Bhupal Bikram Kathayat. (2024). Investigating Public Trust and Ethical Leadership in Nepalese Cooperatives. *Journal of Nepalese Management and Research*, 6(1), 17–28. <https://doi.org/10.3126/jnrm.v6i1.72078>
- Boadu, C., Koomson, F., & Ntiri, R. O. (2024). Social and solidarity economy and social inclusion of cooperatives in the Assin Fosu Municipality, Ghana. *Heliyon*, 10(5), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27094>
- Brzustowski, T., & Caselli, F. (2025). Economic Growth in a Cooperative Economy. *Journal of the European Economic Association*, 23(3), 845–890. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvae050>
- Budiman, L., & Suhendi, D. (2024). Resiliensi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 63–71.
- Cabrerros, A. V., Oliveros, H. M., & Doroteo, R. F. (2025). Building Sustainable Credit Cooperative Through School Community Extension Program. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e05797. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe05797>
- Chatra, A., Dirna, F. C., Alhakim, R., Pujiriyani, D. W., Rosardi, R. G., Maulinda, I., Octaviani, T., Efitra, E., Hudang, A. K., Latif, E. A. (2025). *Potensi Dan Sektor Unggulan Ekonomi Desa*. Star Digital Publishing.
- Dasuki, R. E. (2024). Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Belanja Koperasi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *E-Coops-Day*, 5(2), 249–260. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v5i2.4692>
- Dufays, F., O'Shea, N., Huybrechts, B., & Nelson, T. (2020). Resisting Colonization: Worker Cooperatives' Conceptualization and Behaviour in a Habermasian Perspective. *Work, Employment and Society*, 34(6), 965–984. <https://doi.org/10.1177/0950017019895936>
- Dumitru, E. A., Ursu, A., Tudor, V. C., & Micu, M. M. (2021). Sustainable Development of the Rural Areas from Romania: Development of a Digital Tool to Generate Adapted Solutions at Local Level. *Sustainability*, 13(21), 11921. <https://doi.org/10.3390/su132111921>
- Graneheim, U. H., Lindgren, B.-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. *Nurse Education Today*, 56(2), 29–34. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002>
- Hannachi, M., Fares, M., Coleno, F., & Assens, C. (2020). The “new agricultural collectivism”: How cooperatives horizontal coordination drive multi-stakeholders self-organization. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 8(2), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2020.100111>

- Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 363–375. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2834>
- Hasbi, M., Murtir Jeddawi, Dahyar Daraba, Mansyur Achmad, & Andi Fitri Rahmadany. (2024). Collaborative Governance in the Formulation of Local Revenue and Expenditure Budget in Takalar District, South Sulawesi Province. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 6(3), 132–152. <https://doi.org/10.32996/jefas.2024.6.3.11>
- Hidajat, T. (2025). Village fund corruption mode: an anti-corruption perspective in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 32(2), 444–455. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0042>
- Hilmi Nur Huda Al Mubaroq, Sholichah, N., & Widyawati. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Lokal melalui Pengelolaan Desa Wisata di Desa Panglipuran, Bali untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 103–119. <https://doi.org/10.61404/jimi.v3i1.363>
- Inpres Nomor 9 Tahun 2025, 12 (2025).
- Kamila, F., Rizal, M., Herawati, T., & Sukmayana, D. (2023). Pengaruh Transparansi Terhadap Perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(3), 599–606. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i3.3857>
- Kartika, N. E., & Syafrudin, O. (2023). Peningkatan Usaha Koperasi Wisata Berbasis Potensi Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 11(2), 271–282. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v11i2.13659>
- Khatri Basnet, R. (2023). Role of Cooperatives in Women Empowerment in the Nepalese Context. *Cognition*, 5(1), 99–105. <https://doi.org/10.3126/cognition.v5i1.55417>
- Kumari, N., Malik, J. S., Arun, D. P., & Nain, M. S. (2020). A Study of Self Help Groups in Empowering the Rural Women. *Journal of Extension Systems*, 36(1), 24–28. <https://doi.org/10.48165/JES.2020.36105>
- Ma, W., Marini, M. A., & Rahut, D. B. (2023). Farmers' organizations and sustainable development: An introduction. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(3), 683–700. <https://doi.org/10.1111/apce.12449>
- Maflahah, I., Wirjodirdjo, B., & Karningsih, P. D. (2024). Improving Salt Farmer's Bargain Power through Demand Allocation and Profit Sharing: A Cooperative Game Approach. *International Journal of Technology*, 15(1), 110. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v15i1.5522>
- Mamdouh, N., & Chentoufi, M. A. (2023). Representation and Evaluation of the Global Performance of Cooperatives. *Studies in Business and Economics*, 26(1), 42–79. <https://doi.org/10.29117/sbe.2023.0141>
- Masyhuri, M. A. (2024). The Urgency of Cooperative Development in Rural Areas of Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 266–276. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.636>

- Nawaz, F., Sajjad, A., & Farooq, M. W. (2023). Financial Inclusion (FI) Mediates the Relationship Between Financial Literacy (FL) and Women's Economic Empowerment (WEE). *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 12(3), 761–769. <https://doi.org/10.61506/01.00118>
- Nisha, N. T., Nawaz, N., Mahalakshmi, J., Gajenderan, V., & Hasani, I. (2022). A Study on the Impact of Sustainable Leadership and Core Competencies on Sustainable Competitive Advantage in the Information Technology (IT) Sector. In *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14116899>
- Novkovic, S. (2022). Cooperative identity as a yardstick for transformative change. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93(2), 313–336. <https://doi.org/10.1111/apce.12362>
- Nur Arumsari, D., Anwar, M., & Aditya Fitriyanto, D. (2023). Transformasi Model Bisnis Museum Ke Pariwisata Digital Di Indonesia. *Jurnal Manajerial*, 10(2), 346–359.
- Palupi, A. T. (2024). Netnographic research in understanding social media as a new public sphere. *Digital Theory, Culture & Society*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.61126/dtcs.v2i1.31>
- Rubiyanty, I. M., Mubaroq, A. C., & Rafinda, A. (2025). The Effect of Accountability and Transparency on Cooperative Financial Management of Sakra Warih Conventional Consumer Cooperative of Banyumas Regency. *Owner*, 9(1), 491–500. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2400>
- Sapkota, K. N. (2024). Cooperatives and Socio-Economic Empowerment Among Rural Women. *Researcher CAB: A Journal for Research and Development*, 3(1), 131–144. <https://doi.org/10.3126/rcab.v3i1.68426>
- Setiawan, H. (2022). Rethinking Patterns Development of Aceh's Socio-Economic Welfare After Two Decades of Implementing Asymmetric Autonomy "Special Autonomy." *Journal of Government and Political Issues*, 2(1), 8–21. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v2i1.27>
- Shpykuliak, O., & Sakovska, O. (2020). Agricultural Cooperation As An Innovation For Rural Development. *Baltic Journal of Economic Studies*, 6(3), 183–189. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-183-189>
- Siagian, T. R., Rahma, T. I. F., & Sugianto, S. (2025). Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Melalui Bank Keliling : Bagaimana Peran Pemerintah. *Jurnal Manajerial*, 12(02), 378–400. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i02.9776>
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
- Su, Y., Xu, H., & Zhang, X. (2024). How Can Public Spaces Contribute to Increased Incomes for Urban Residents—A Social Capital Perspective. *Land*, 13(7), 945. <https://doi.org/10.3390/land13070945>
- Sutikno, Hardi Mulyono, Farida Yani, Anggia Sari Lubis, Leni Handayani, Enny Fitriani, & Sutarini. (2023). Study Model Of Women's Empowerment In Improving Member Participation And Family Welfare Through Cooperatives In North Sumatra. *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture*, 34(1), 398–403. <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.1017>

- Suyitno, S. (2018). Pengaruh Komponen Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan PT. BPR Nusamba Brondong-Lamongan. *Jurnal Manajerial*, 1(2), 168. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v1i2.199>
- Tadesse, G., Abate, G. T., & Ergano, K. (2019). The Boundary of Smallholder Producers' Cooperatives: A Conceptual and Empirical Analysis. *Journal of Agricultural Economics*, 70(2), 529–549. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12310>
- Vijaya. (2025). Building a Better World: The Impact and Potential of Cooperatives. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(2), 1–26. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.42501>
- Wahib, M., & Susanto, A. (2024). Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 2(6), 330–341.
- Widjaja, H. (2024). Strengthening Village Economies Through Cooperative Business Model Training. *International Assulta of Research and Engagement (IARE)*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.70610/iare.v3i1.809>
- Zhong, Z., Jiang, W., & Li, Y. (2023). Bridging the gap between smallholders and modern agriculture: Full insight into China's agricultural cooperatives. *Journal of Rural Studies*, 101(2), 103037. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103037>